

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rohingya menunjukkan pola yang beragam dan tidak bergerak secara linear dari penerimaan menuju penolakan. Hasil reduksi dan *coding* data menunjukkan tiga kecenderungan utama. Pertama, terdapat narasumber yang mempertahankan penerimaan karena dipengaruhi oleh kesamaan agama, nilai *pemulia jamee*, serta pengalaman interaksi langsung melalui pemberian bantuan dan kegiatan sosial. Kedua, terdapat narasumber yang mengalami perubahan atau menjadi lebih berhati-hati setelah memperoleh informasi melalui berita dan media sosial serta mempertimbangkan persoalan keamanan, ketertiban, dan keberadaan pengungsi dalam jangka panjang. Ketiga, terdapat narasumber yang sejak awal menunjukkan keberatan terhadap keberadaan atau penempatan pengungsi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman, informasi, dan interpretasi terhadap keberadaan pengungsi menghasilkan lintasan sikap yang berbeda pada keenam narasumber.

Dalam perspektif Alexander Wendt, perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *role identity* dan *interaction*. *Role identity* terlihat dari perbedaan pemaknaan narasumber terhadap posisi masyarakat sebagai *Self* dan pengungsi Rohingya sebagai *Other*. Sebagian narasumber memaknai dirinya sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan dan menerima pengungsi, sedangkan sebagian lainnya lebih menekankan kepentingan keamanan, ketertiban, dan norma lokal. Sementara itu, *interaction* berlangsung melalui pengalaman langsung, seperti pemberian bantuan, kunjungan ke *shelter*, kegiatan sosial, dan hubungan ekonomi,

maupun melalui interaksi tidak langsung berupa berita, media sosial, dan informasi dari lingkungan sosial. Dengan demikian, berdasarkan enam narasumber yang diteliti, perubahan maupun keberlanjutan sikap terhadap pengungsi Rohingya terbentuk melalui hubungan antara posisi sosial, pengalaman interaksi, informasi yang diterima, dan proses pemaknaan terhadap keberadaan pengungsi. Temuan tersebut terbatas pada pengalaman dan pandangan keenam narasumber dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran atau generalisasi mengenai sikap seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian terhadap enam narasumber menunjukkan adanya beberapa bentuk sikap, yaitu sikap yang relatif tetap menerima, sikap yang mengalami perubahan atau menjadi lebih berhati-hati, serta sikap yang menunjukkan keberatan terhadap keberadaan atau penempatan pengungsi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sikap bukanlah proses yang berlangsung secara linear dan seragam. Pada sebagian narasumber, pengalaman dan interaksi tertentu dapat mempertahankan pemaknaan kemanusiaan, sedangkan pada narasumber lainnya pengalaman dan informasi yang berbeda dapat menghasilkan pemaknaan yang lebih berhati-hati atau resistif.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perubahan sikap yang ditemukan pada enam narasumber terbentuk melalui hubungan antara *role identity*, *interaction*, dan proses pemaknaan sosial terhadap keberadaan pengungsi Rohingya. Temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe mengalami perubahan dari solidaritas menuju resistensi. Sebaliknya, penelitian menunjukkan adanya ragam lintasan sikap pada

enam narasumber, baik berupa penerimaan yang bertahan, perubahan sikap, maupun keberatan terhadap keberadaan atau penempatan pengungsi. Dengan batasan tersebut, kesimpulan penelitian ditempatkan sebagai gambaran mendalam mengenai pengalaman dan pemaknaan enam narasumber, bukan sebagai generalisasi mengenai keseluruhan masyarakat Kota Lhokseumawe.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian terhadap enam narasumber, saran yang diberikan diarahkan pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya dan pembentukan interaksi dengan masyarakat lokal. Saran ini tidak ditujukan untuk mewakili kebutuhan seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe, tetapi sebagai rekomendasi berdasarkan pengalaman, pemaknaan, dan bentuk interaksi yang ditemukan pada keenam narasumber.

Pertama, Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Pemerintah Aceh perlu meningkatkan komunikasi publik kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi penampungan pengungsi Rohingya. Komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan warga, forum dengan tokoh masyarakat, penyampaian informasi melalui kanal resmi pemerintah, serta pemberian informasi secara berkala mengenai jumlah pengungsi, kondisi *shelter*, jangka waktu penampungan, dan mekanisme penanganan pengungsi. Langkah ini penting karena temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap narasumber tidak hanya terbentuk melalui interaksi langsung dengan pengungsi, tetapi juga melalui informasi yang diperoleh dari lingkungan sosial dan media. Dengan informasi yang lebih terbuka dan

terverifikasi, masyarakat memiliki sumber informasi resmi yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan penanganan pengungsi.

Kedua, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu melibatkan masyarakat sekitar sebelum menentukan atau memindahkan lokasi penampungan pengungsi. Bentuk keterlibatan dapat dilakukan melalui forum konsultasi dengan warga, tokoh masyarakat, perangkat *gampong*, serta pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi calon *shelter*. Pemerintah perlu menjelaskan alasan pemilihan lokasi, kapasitas penampungan, fasilitas yang tersedia, mekanisme keamanan, serta pembagian tanggung jawab selama *shelter* digunakan. Saran ini didasarkan pada temuan mengenai munculnya keberatan masyarakat terhadap beberapa rencana lokasi penempatan pengungsi. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, proses penempatan tidak hanya diposisikan sebagai keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai proses komunikasi dan interaksi dengan komunitas yang berada di sekitar lokasi.

Ketiga, UNHCR, IOM, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan yang terlibat dalam penanganan pengungsi perlu memperluas kegiatan interaksi langsung yang melibatkan masyarakat lokal secara terstruktur dan aman. Kegiatan tersebut dapat berbentuk program edukasi, kegiatan sosial, pelatihan keterampilan, kegiatan kebersihan lingkungan, atau aktivitas kemanusiaan yang mempertemukan masyarakat dan pengungsi dalam kondisi yang terkontrol. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman interaksi langsung menjadi salah satu pengalaman yang digunakan narasumber dalam membentuk pemaknaan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, ruang interaksi yang terarah dapat memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengalaman secara langsung, bukan hanya membangun pemahaman berdasarkan pemberitaan atau informasi dari lingkungan sosial.

Keempat, pemerintah daerah bersama UNHCR dan IOM perlu memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan pengungsi dan mekanisme penyelesaian jangka menengah maupun jangka panjang. Informasi tersebut dapat disampaikan secara berkala melalui forum masyarakat dan kanal informasi resmi. Pemerintah juga perlu menjelaskan perubahan jumlah pengungsi, proses pemindahan, kapasitas *shelter*, serta bentuk koordinasi dengan lembaga internasional. Saran ini berkaitan dengan temuan bahwa perubahan konteks keberadaan pengungsi, termasuk persoalan lokasi dan penampungan, menjadi bagian dari lingkungan sosial yang membentuk pemaknaan masyarakat. Kejelasan informasi dapat membantu masyarakat memahami bahwa penanganan pengungsi merupakan proses yang melibatkan beberapa pihak dan memiliki mekanisme tertentu.

Kelima, pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan perlu membangun mekanisme komunikasi dua arah dengan masyarakat sekitar *shelter*, bukan hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mekanisme tersebut dapat berupa pertemuan rutin dengan warga, penyediaan saluran pengaduan, serta forum evaluasi berkala yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengalaman, kekhawatiran, dan pertanyaan terkait keberadaan pengungsi. Masukan tersebut kemudian dapat didokumentasikan dan diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan. Bentuk komunikasi dua arah ini penting karena temuan penelitian

menunjukkan bahwa sikap tidak hanya terbentuk melalui informasi yang diterima, tetapi juga melalui pengalaman dan interaksi sosial yang berlangsung dari waktu ke waktu.

Keenam, bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai sikap masyarakat terhadap pengungsi Rohingya dapat memperluas variasi informan berdasarkan kedekatan dengan lokasi *shelter*, keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan, kelompok usia, pekerjaan, serta pengalaman interaksi langsung dengan pengungsi. Penelitian berikutnya juga dapat melakukan wawancara secara longitudinal terhadap informan yang sama untuk mengetahui apakah perubahan sikap benar-benar terjadi pada individu yang sama dari waktu ke waktu. Pendekatan tersebut dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjelaskan perubahan sikap secara temporal dan membedakan antara perubahan sikap individu dengan perbedaan sikap antarkelompok masyarakat.